

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2025



3 Jul 2023 11:26:2
38° N
Wawali Pasa
Kecamatan Ratah
Kabupaten Minahasa Tengga
Sulawesi Uta
Altitude:371.6
Index number:



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 Tahun yaitu Tahun 2025. Renja SKPD memuat perubahan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan SKPD lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD. Pelaksanaan dari program dan kegiatan ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama dan kerja keras dari unsur yang terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan kontribusi yang nyata bagi Daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dan bagi Bangsa dan Negara umumnya.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat bagi Perangkat Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Ratahan, Juli 2024
Sekretaris DPRD,

DJELLY WARUIS, S.Pt, MM.
NIP. 197007241995032005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistimatika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang/kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan daerah secara mandiri dan demokratis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentulah diperlukan suatu tindakan nyata dalam menyongsong kemajuan teknologi modern yang salah satunya dengan melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya dipusat terbagi kedalam 3 (tiga) dokumen yaitu, 1) Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, 2) Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan 3) Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD). Untuk tataran SKPD terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan yaitu, 1) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah sebagai wujud dukungan terhadap program pembangunan daerah berlandaskan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disempurnakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai arti yang strategis karena memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut.

- a) Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b) Renja tahun 2025 merupakan acuan SKPD untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2025;

- c) Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
- b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- c. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- d. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan Renstra Tahun 2024-2026;
- e. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dan keempat dari RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Minahasa Tenggara. RPJMD Tahun

2018-2025 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Setiap Perangkat Daerah selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah..

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah;

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah salah-satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 memuat Program, Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah;

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut:

Dimulai dengan Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi tim penyusun, penyusunan agenda kerja tim dan penyiapan data dan informasi.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yaitu proses penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Penyusunan Rancangan Renja yang merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Renja Perangkat Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah diverifikasi oleh BAPEDA.

3. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;

Sebagai salah satu dokumen Perencanaan Daerah, Renja Perangkat Daerah dalam penyusunannya harus mengacu dan selaras dengan penyusunan RKPD dan sebagai bagian dari dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun ke dalam rencana tahunan yang lebih konkrit dan terukur melalui penajaman, program, kegiatan, target kinerja, lokasi, kelompok sasaran dan penganggaran. Renja Perangkat Daerah juga erat kaitannya dengan Renja Kementerian/Lembaga maupun Renja Perangkat Daerah Provinsi dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang lainnya. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga maupun Renja Perangkat Daerah Provinsi dan harus bersinergi dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-Perangkat Daerah. RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan DPRD, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja (Renja);
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;

5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025, mengacu pada sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 86 hal 400-408 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen terdiri dari:

BAB I.PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan secara sistimatis dan komprehensif sebagai upaya pengintegrasian berbagai fungsi manajemen sehingga semua pihak atau stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dapat mengetahui dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Kejelasan rencana akan mempermudah pemilihan strategi dan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan proses monitoring, evaluasi yang terencana, jelas, terbuka dan melibatkan partisipasi semua pihak diharapkan akan memudahkan proses perbaikan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan pelaporannya. Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 merupakan bagian dari sebuah proses membangun pemahaman bersama tentang apa yang dicapai, bagaimana proses pencapaiannya, faktor pendorong sehingga target tercapai dan faktor yang menghambat pencapaian target kinerja.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kejelasan rencana akan mempermudah pemilihan strategi dan pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan merupakan hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Sementara pemantauan (monitoring) adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Evaluasi dilakukan setelah proses monitoring dimana di dalamnya dilakukan pengukuran kinerja dan pencatatan serta perbandingan antara kinerja aktual dengan standar kinerja. Tahap selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis dimaksudkan untuk mengetahui capaian dan kesalahan/penyimpangan yang terjadi. Apabila kinerja yang dicapai sesuai/tidak menyimpang dari standar yang telah ditentukan maka proses berlanjut ke pelaporan, sedangkan bila terjadi penyimpangan akan dilakukan perbaikan (improving). Tahap terakhir dari proses manajemen kinerja adalah pelaporan (reporting), yaitu segenap kegiatan menyusun dan menyampaikan keterangan tertulis mengenai segala sesuatu dalam organisasi perangkat daerah sebagai wujud nyata sistim akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi.

Dalam kurun waktu tahun 2 Tahun terakhir pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan meskipun didalam pelaksanaannya masih terkendala dampak yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi serta pandemic Virus Corona Covid-19 yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan. Kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran program/kegiatan. Hasil Renja secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP Perangkat Daerah		A Kategori	17.871.360.562	16.226.267.063	100	17.871.360.562	25	2.924.246.056	25	4.172.428.630	25	5.454.322.427	18.517.658.032	31.068.655.145	48.940.015.707	274 %	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	13.045.950	1000	9.870.200	100	13.045.950	-	-	7.939.800	37.518.300	-	45.458.100	1000	55.328.300	1	424 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3.448.500	1000	9.870.200		3.448.500	-	-	-	3.448.500	-	3.448.500	1000	13.318.700	33	386 %
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.028.800	1000	-		1.028.800	-	-	-	13.205.600	-	13.205.600	1000	13.205.600	100	1284 %
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1.438.000	1000	-		1.438.000	-	-	-	1.438.000	-	1.438.000	1000	1.438.000	100	100 %

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	%	5	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	20	#DIV/0!
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	%	1	3.971.300	100	-	3.971.300	-	-	-	3.971.300	-	3.971.300	100	3.971.300	100	100%
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	%	2	907.700	100	-	907.700	-	-	-	907.000	-	907.000	100	907.000	50	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	%	1	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	#DIV/0!

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	12	73.835.700	18	93.285.000		73.835.700	25	6.000.000		9.375.000	25	-	52.160.700	50	67.535.700	68	160.820.700	6	218%
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	56.376.000		0	100	56.376.000	25	23.367.240	25	9.490.500	25	6.463.000	94.506.140	75	133.826.880	75	133.826.880	1	237%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	-				-	25	-	25	-	25	-	-	75	-	75	-	75	#DIV/0!
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	20	-				-	25	-	25	-	25	-	-	75	-	75	-	4	#DIV/0!
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	4.386.000				4.386.000	25	-	25	3.624.500	25	-	4.264.500	75	7.889.000	75	7.889.000	75	180%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	-				-	25	-	25	-	25	-	-	75	-	75	-	75	#DIV/0!

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	24		18.694.000			18.694.000	25	-	25	5.866.000	25	-	18.126.000	75	23.992.000	75	23.992.000	3	128%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1		-			-	25	-	25	-	25	-	-	75	-	75	-	75	#DIV/0!	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1		-			-	25	-	25	-	25	-	-	75	-	75	-	75	#DIV/0!	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2		33.296.000			33.296.000	25	23.367.240	25	-	25	-	72.115.640	75	95.482.880	75	95.482.880	38	287%	
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat	%	100		332.203.800	100	644.079.417	100	332.203.800	25	66.975.600	25	80.102.800	25	88.422.052	445.791.852	75	681.292.304	175	1.325.371.721	2	399%

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.131.536.084	100	2.535.554.996	100	1.131.536.084	25	232.014.185	340.897.373	346.633.334	1.436.379.253	2.355.924.145	4.891.479.141	2	432 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	162.096.084		137.976.996		162.096.084	25	46.326.185	39.815.373	-	186.951.253	273.092.811	411.069.807	15	254 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	969.440.000		2.397.578.000		969.440.000	25	185.688.000	301.082.000	-	1.249.428.000	1.736.198.000	4.133.776.000	15	426 %

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	982.053.360	100	446.266.212	100	982.053.360	25	45.471.826	25	145.158.673	25	87.310.916	940.539.924	75	1.218.481.339	175	1.664.747.551	2	170%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48	193.823.360	100	287.302.012	4	193.823.360	25	40.053.326	25	73.128.573	25	-	262.943.962	75	376.125.861	175	663.427.873	4	342%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	180.360.000	100	5.436.600	14	180.360.000	25	5.418.500	25	60.472.900	25	-	163.772.900	75	229.664.300	175	235.100.900	1	130%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	107.870.000	100	64.277.600		107.870.000	25	-	25	11.557.200	25	-	19.706.800	75	31.264.000	175	95.541.600	25	89%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit		500.000.000	100	89.250.000	1	500.000.000	25	-	25	-	25		494.116.262	75	494.116.262	175	583.366.262	#DIV/0!	117%

		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	182.410.500	16	182.813.000	12	182.410.500	-	41.420.000	-	182.230.500	223.650.500	16	406.061.000	1	223 %	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	30	356.141.200	130	388.171.250	12	356.141.200	-	150.808.000	-	448.968.100	599.776.100	130	955.917.300	4	268 %	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	1	24.194.500	25	374.229.350	1	24.194.500	-	12.577.000	-	15.116.000	27.693.000	25	51.887.500	25	214 %	
Rata- Rata Capaian Kinerja (%)																				
Predikat Kerja																				
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam	%	100	9.335.293.400	100	8.772.310.786	100	9.335.293.400	25	2.475.325.462	25	2.820.693.702	25	2653420456	11503659410	19.453.099.030		

11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	84.999.500	1000	2.019.150	100	84.999.500	-	-	25	8.898.500	56.352.500	25	65.251.000	125	67.270.150	1	79%
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	%	5	4.465.500	100	2.019.150		4.465.500	-	-		-	3.868.500	-	3.868.500	100	5.887.650	20	132%
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	%		28.131.500	100	-		28.131.500	-	-		-	30.861.500	-	30.861.500	100	30.861.500	#DIV/0!	110%
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	%		22.213.500	100	-		22.213.500	-	-		-	21.433.500	-	21.433.500	100	21.433.500	#DIV/0!	96%
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	%		30.189.000	100	-		30.189.000	-	-		-	189.000	-	189.000	100	189.000	#DIV/0!	1%
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib	%		-	100	-		-	-	-		-	-	-	-	100	-	#DIV/0!	#DIV/0!

		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	%	1	15.385.900	100	12.024.000		15.385.900	-	-	-	3.485.900	-	3.485.900	100	15.509.900	100	101%	
13		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	49.743.900	100	56.570.000	100	49.743.900	-	-	50	21.105.000	24.534.000	50	45.639.000	150	102.209.000	2	205%
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	%	1	5.857.500	100	8.476.000		5.857.500	-	-	-	467.500	-	467.500	100	8.943.500	100	153%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	%	1	5.854.500	100	3.818.000		5.854.500	-	-	-	764.500	-	764.500	100	4.582.500	100	78%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	1	5.571.000	100	7.734.000		5.571.000	-	-	-	4.871.000	-	4.871.000	100	12.605.000	100	226%	

		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	%	1		5.546.000	100	6.466.000		5.546.000		-	-	-	4.511.000	-	4.511.000	100	10.977.000	100	198%
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	%	1		6.349.000	100	7.548.000		6.349.000		-	-	-	874.000	-	874.000	100	8.422.000	100	133%
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	%	1		2.454.000	100	4.830.000		2.454.000		-	-	-	354.000	-	354.000	100	5.184.000	100	211%
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	%	1		2.732.000	100	5.292.000		2.732.000		-	-	-	632.000	-	632.000	100	5.924.000	100	217%
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	%	1		15.379.900	100	17.698.000		15.379.900		-	-	-	12.060.000	-	12.060.000	100	29.758.000	100	193%

		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	%			-	-													#DIV/0!	#DIV/0!			
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	%			-	-														#DIV/0!	#DIV/0!		
17		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100		-	100	17.944.000	100										100	17.944.000	1	#DIV/0!		
		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	%	1		-	100	8.280.000												100	8.280.000	100	#DIV/0!	
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	%	1		-	100	9.664.000													100	9.664.000	100	#DIV/0!
18		Fasilitasi Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	6.323.713.500		100	7.134.053.136	100	6.323.713.500	25	1.960.586.533	25	1.985.017.713	25	1.754.517.016	75	7.786.831.090	75	13.486.952.352	20.621.005.488	2	326%	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	Dokumen	1200	6.262.419.700			7.007.079.936		6.262.419.700		1.960.586.533		1.961.257.713		-		7.738.469.790		11.660.314.036	17.922.733.736	#DIV/0!	286%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Capaian kinerja ini terbagi dalam dua bagian yaitu berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi PD yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dan juga tingkat capaian kinerja berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan PD, yang kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat					75	80	85	85	85	85	

Berdasarkan Tabel diatas, menyajikan informasi tentang capaian kinerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD sejak tahun pertama periode Renstra yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023 awal. Tabel tersebut menyajikan data program dan kegiatan yang masih mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2023 awal melaksanakan 2 Program dan 14 Kegiatan yang semuanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Capaian masing-masing program dan kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah 75%, karena data dibuat berdasarkan capaian realisasi tidak lagi membandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra sebelumnya, kecuali pada pada kolom realisasi dan rasio tahun ke-3 yaitu tahun 2021 belum terdapat capaian atau realisasi karena dalam proses pelaksanaan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Evaluasi Renstra Periode 2018-2023.

Pada tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang tidak memiliki capaian kinerja, hal ini dikarenakan adanya pandemic virus Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya revocusing anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan kasus covid-19, dengan adanya revocusing anggaran menyebabkan terjadinya pengurangan anggaran sehingga mengakibatkan berubahnya target kinerja yang

ditetapkan sebelumnya atau yang direncanakan dalam dokumen Renstra periode 2018-2023.

Namun hal ini bukanlah tantangan, melainkan baik program maupun kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang ada di Sekretariat DPRD tetap dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Didalam kedudukannya tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Sekretariat DPRD. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi. Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Sekretariat DPRD berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

2.3.1 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kab. Minahasa Tenggara, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kab. Minahasa Tenggara adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah ditetapkan.
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

A. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

B. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.3.3 Isu Strategis

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara:

- a) Tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara guna peningkatan kapasitas DPRD.
- b) Tingginya Standar Pelayanan yang dibutuhkan DPRD seiring dengan makin meningkatnya volume kegiatan DPRD
- c) Belum maksimalnya pemenuhan terhadap tuntutan aspirasi masyarakat khususnya melalui kegiatan Reses DPRD.
- d) Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- e) Belum tersedianya standar/pedoman pelayanan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Guna Menghadapi isu-isu strategis tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- b) Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
- d) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara agar aspirasi-aspirasi masyarakat yang berasal dari Kelurahan dan Desa melalui hasil kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja DPRD agar dapat lebih diperhatikan.
- e) Merumuskan dan menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) setiap kegiatan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan layanan kepada DPRD, pelaksanaan keprotokoleran dan kehumasan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Setelah dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD tidak ditemukan perbedaan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Minahasa Tenggara

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	RANCANGAN AWAL RKDP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Nilai LKIP Perangkat Daerah	BB	15.083.566.961,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Nilai LKIP Perangkat Daerah	BB	15.083.566.961,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	32.995.900,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	32.995.900,00	
	Administrasi Keuangan PD		Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan PD	100	2.557.260.246,00	Administrasi Keuangan PD		Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan PD	100	2.557.260.246,00	
	Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah	100	9.008.800,00	Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah	100	9.008.800,00	
	Administrasi Kepegawaian PD		Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	100	207.709.600,00	Administrasi Kepegawaian PD		Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	100	207.709.600,00	
	Administrasi Umum PD		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	100	354.830.100,00	Administrasi Umum PD		Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD	100	354.830.100,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	443.609.564,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	443.609.564,00	

			Daerah					Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.007.491.255,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.007.491.255,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	673.730.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	673.730.000,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Terlaksananya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	9.210.522.296,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Terlaksananya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	9.210.522.296,00	
	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Terlaksananya kegiatan layanan administrasi DPRD	100	586.409.200,00	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Terlaksananya kegiatan layanan administrasi DPRD	100	586.409.200,00	
	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	90	12.123.087.001,00	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	90	12.123.087.001,00	

			Persentase terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pebentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	90				Persentase terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pebentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	90	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	66.732.000,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	66.732.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	75.155.900,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	75.155.900,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	122.240.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	122.240.000,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100	1.951.463.500,00	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100	1.951.463.500,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	1.133.822.500,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	1.133.822.500,00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100	10.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode	100	10.000.000,00

		DPRD					Etik DPRD			
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	100	15.000.000,00	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	100	15.000.000,00	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100	8.748.673.101,00	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100	8.748.673.101,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) berdasarkan asa demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Mengingat Sekretariat DPRD berdasarkan tugas dan fungsinya tidak memiliki korelasi dengan pihak/Lembaga lain (masyarakat, LSM, asosiasi dan sebagainya) sehingga pada Tahun 2025, tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari eksternal

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Minahasa Tenggara

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Di samping itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara juga harus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Maka, perlu dilakukan telaahan juga terhadap kebijakan provinsi yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 219 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan.
- b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- c. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 - 2026, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyusun Renstra yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan menjadi mitra terbaik guna terwujudnya daya dukung dan fasilitasi yang prima dalam meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut memiliki makna:

1. Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan 3 fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah;
2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan Sumber Daya Aparatur yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holders dapat terjalin secara baik

3.3 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan tujuan dan sasaran diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dimana Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurung waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tujuan dan sasaran juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strateji yang telah dipilih. Perumusan tujuan dan sasaran instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan sasaran hendaknya mampu:

1. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam tujuan
2. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
3. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan
4. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

Setiap satuan kerja harus memastikan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran satuan kerja. Tujuan dan sasaran merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan tujuan menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai LKIP Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga daerah yang melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dituntut untuk menghasilkan produk-produk layanan yang berkualitas terutama produk yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Salah satu upaya guna mendukung tercapainya target baik tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD 2024 - 2026 untuk tahun perencanaan 2025 serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang termuat dalam RKPD Provinsi Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara merumuskan program dan beberapa kegiatan prioritas diantaranya :

- a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah
- h. Fasilitasi Tugas DPRD

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari kegiatan rutinitas perkantoran, Serta kegiatan yang sifatnya fasilitasi/menunjang Tugas dan Fungsi DPRD serta kegiatan pendukung lainnya. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD			27.206.653.962,0 0							27.991.000.000,0 0	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			27.206.653.962,0 0				27.206.653.9 62	0,00		27.991.000.000,0 0	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			27.206.653.962,0 0							27.991.000.000,0 0	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai LKIP Perangkat Daerah</i>	BB Kategori	15.078.566.961,0 0						<i>Nilai LKIP Perangka t Daerah</i>	15.224.800.000,0 0	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	32.995.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkata n e- government	ASN dan THL	100 %	33.900.000,00	SEKRETARI AT DPRD

4.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	4.871.300,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	SEKRETARI AT DPRD	4 Dokumen	5.000.000,00	
4.02.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	8.966.000,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	SEKRETARI AT DPRD	1 Dokumen	9.000.000,00	
4.02.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	1 Dokumen	2.320.300,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	SEKRETARI AT DPRD	1 Dokumen	2.500.000,00	
4.02.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	3.422.100,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	SEKRETARI AT DPRD	1 Dokumen	3.600.000,00	

4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	8.982.100,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 Dokumen	9.000.000,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	2.416.600,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	2 Laporan	2.600.000,00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	2.017.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 Laporan	2.200.000,00

	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	2.557.260.246,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	2.577.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	20 Orang/bulan	2.431.513.401,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	20 Orang/bulan	2.450.000.000,00	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	12 laporan	2.024.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	12 laporan	2.200.000,00	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1500 Dokumen	108.898.945,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1500 Dokumen	110.000.000,00	

4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 laporan	1.982.600,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	12 laporan	2.000.000,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	8.671.600,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 Laporan	8.800.000,00	
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	5 Dokumen	1.237.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	5 Dokumen	1.500.000,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.024.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD		2.200.000,00	

4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	907.700,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD		1.000.000,00	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %	9.008.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen	1.544.100,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	2 Dokumen	1.700.000,00	
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	2.410.200,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	4 Laporan	2.500.000,00	

4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.054.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	5.200.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	207.709.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	214.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 paket	5.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN, THL	1 paket	5.100.000,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Pegawai	20 psg	45.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN, THL	20 psg	47.000.000,00	

4.02.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen	4.910.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	12 Dokumen	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	1.544.100,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	1 laporan	1.800.000,00	
4.02.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	12 Dokumen	51.328.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	12 Dokumen	52.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	2	30.261.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	2	30.500.000,00	
4.02.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2	10.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	2	12.000.000,00	

4.02.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	4 Orang	59.666.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN	4 Orang	61.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	349.830.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	358.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	14.499.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 Paket	14.600.000,00	
4.02.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	5.680.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 paket	5.700.000,00	

4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	7.447.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	12 Paket	7.600.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	69.230.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	TAMU SEKRETARIAT DPRD	12 Laporan	70.000.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan	252.973.600,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	ASN dan THL	50 Laporan	255.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	443.609.564,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	464.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	293.609.564,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 Unit	300.000.000,00
4.02.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 Unit	27.000.000,00
4.02.01.2.07.00 03	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah paket pengadaan meubel</i>	1 paket	25.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 paket	27.000.000,00
4.02.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 paket	50.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 paket	55.000.000,00
4.02.01.2.07.00 0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	1 gedung	50.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 gedung	55.000.000,00

4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.007.491.255,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	1.032.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	180.540.520,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD		182.000.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	826.950.735,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	THL		850.000.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	673.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	100 %	701.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	4 Unit	174.680.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	4 Unit	176.000.000,00
4.02.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	13 Unit	180.360.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	13 Unit	185.000.000,00
4.02.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	118.690.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	10 Unit	120.000.000,00
4.02.01.2.09.00 0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung yang terpelihara</i>	1 gedung	200.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	1 gedung	220.000.000,00

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	100 %	9.210.522.296,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	9.242.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	25 Orang/Bulan	8.973.022.296,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang/Bulan	9.000.000.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	25 pasang	50.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	Pimpinan dan Anggota DPRD	25 pasang	52.000.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	25 Orang	187.500.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang	190.000.000,00	

	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD</i>	100 %	586.409.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	592.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	<i>Jumlah Laporan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD</i>	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government		12 Laporan	12.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	24 Laporan	182.410.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	24 Laporan	185.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	24 Laporan	369.804.200,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	24 Laporan	370.000.000,00	

	4.02.01.2.16.00 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>	12 Paket	24.194.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	12 Paket	25.000.000,00	
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase terintegrasinya program - program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pebentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)</i>	100 %	12.123.087.001,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	12.766.200.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	100 %	66.732.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	68.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.00 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	1 Dokumen	3.685.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	3.800.000,00	

4.02.02.2.01.00 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	1 Dokumen	5.924.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	6.100.000,00	
4.02.02.2.01.00 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	1 Dokumen	4.102.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	4.300.000,00	
4.02.02.2.01.00 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>	1 Dokumen	53.019.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	53.800.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	100 %	75.155.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	75.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD

4.02.02.2.02.00 01	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	1 Dokumen	14.297.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	14.350.000,00	
4.02.02.2.02.00 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	1 Dokumen	13.896.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	14.000.000,00	
4.02.02.2.02.00 03	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	1 Dokumen	16.296.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	16.400.000,00	
4.02.02.2.02.00 04	Pembahasan APBD Perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan</i>	1 Dokumen	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	15.350.000,00	

4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	15.385.900,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	15.450.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	122.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	122.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	15.350.000,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	15.350.000,00	

4.02.02.2.03.003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	1 Laporan	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	15.350.000,00
4.02.02.2.03.004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	15.350.000,00
4.02.02.2.03.005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	1 Laporan	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	15.350.000,00
4.02.02.2.03.006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	1 Dokumen	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	15.350.000,00

4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	1 Dokumen	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	15.350.000,00	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>	1 Dokumen	15.280.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	15.350.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	100 %	1.951.463.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	2.100.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>	1 Dokumen	221.839.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	250.000.000,00	

4.02.02.2.04.00 02	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	1 Dokumen	1.111.255.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	1.200.000.000,00	
4.02.02.2.04.00 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	2 Orang	12.000.000,00	
4.02.02.2.04.00 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	20 Orang	600.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	20 Orang	630.000.000,00	
4.02.02.2.04.00 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	5 Dokumen	2.789.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	5 Dokumen	2.900.000,00	

4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	1 Dokumen	2.789.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	2.900.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	1 Dokumen	2.789.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	2.900.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	100 %	1.133.822.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	1.317.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	300 Laporan	13.450.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	300 Laporan	13.550.000,00	

4.02.02.2.05.00 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>	25 Dokumen	3.239.500,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	DPRD	25 Dokumen	3.500.000,00	
4.02.02.2.05.00 03	Pelaksanaan Reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	2 kegiatan reses untuk 25 orang dewan	1.117.132.500,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	DPRD	2 kegiatan reses untuk 25 orang dewan	1.300.000.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkata n e- government	DPRD	100 %	11.000.000,00	SEKRETARI AT DPRD
4.02.02.2.06.00 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah dokumen hasil penyusunan kode etik</i>	1 dokumen	5.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangun an Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah an dan Peningkatan e-government	DPRD	1 dokumen	5.500.000,00 S	

4.02.02.2.06.00 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	5.500.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah</i>	100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.07.00 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i>	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	10.500.000,00	
4.02.02.2.07.00 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Dokumen	5.500.000,00	

	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD</i>	100 %	8.748.673.101,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	100 %	9.055.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	1200 Dokumen	8.203.195.301,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1200 Dokumen	8.500.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>	1 Laporan	2.462.500,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	1 Laporan	2.600.000,00	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	12 Dokumen	22.215.300,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	12 Dokumen	22.500.000,00	

	4.02.02.2.08.00 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	12 Dokumen	520.800.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	DPRD	12 Dokumen	530.000.000,00	
	X	NON URUSAN			5.000.000,00							5.500.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			5.000.000,00							5.500.000,00	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai LKIP Perangkat Daerah</i>	BB Kategori	5.000.000,00					SEKRETARIAT DPRD	-	5.500.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD	-	5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan e-government	SEKRETARIAT DPRD		5.500.000,00	
J U M L A H					27.206.653.962,00							27.991.000.000,0	

BAB V **Penutup**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang disusun merupakan salah satu dokumen perencanaan satu tahun dinas yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten dan Rencana strategis dinas dengan merujuk pada dokumen perencanaan tingkat provinsi dan pusat. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dinas dan mendukung program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja ini telah disusun secara terarah berdasarkan pengelolaan data dan informasi yang ada, Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi PD untuk mencapai Pernyataan Tujuan dan Sasaran dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya aparatur yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Indikator dan Target Kinerja program kegiatan telah ditetapkan secara terukur dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, sumber daya PD dan alokasi Pagu Indikatif.

Keberhasilan pencapaian Pernyataan Tujuan, Sasaran dan besaran Target Kinerja sangat ditentukan oleh alokasi Pagu Anggaran oleh sebab itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman terhadap Dokumen Renja ini baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada PD pelaksana. Kami menyadari bahwa Renja ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen Renja ini.

Ratahan, Juli 2024
Sekretaris DPRD,

DJELLY WARUIS, S.Pt, MM.

NIP. 197007241995032005